**TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENGATASI PELANGGARAN ANGGOTA BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN RI NO. 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK POLRI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

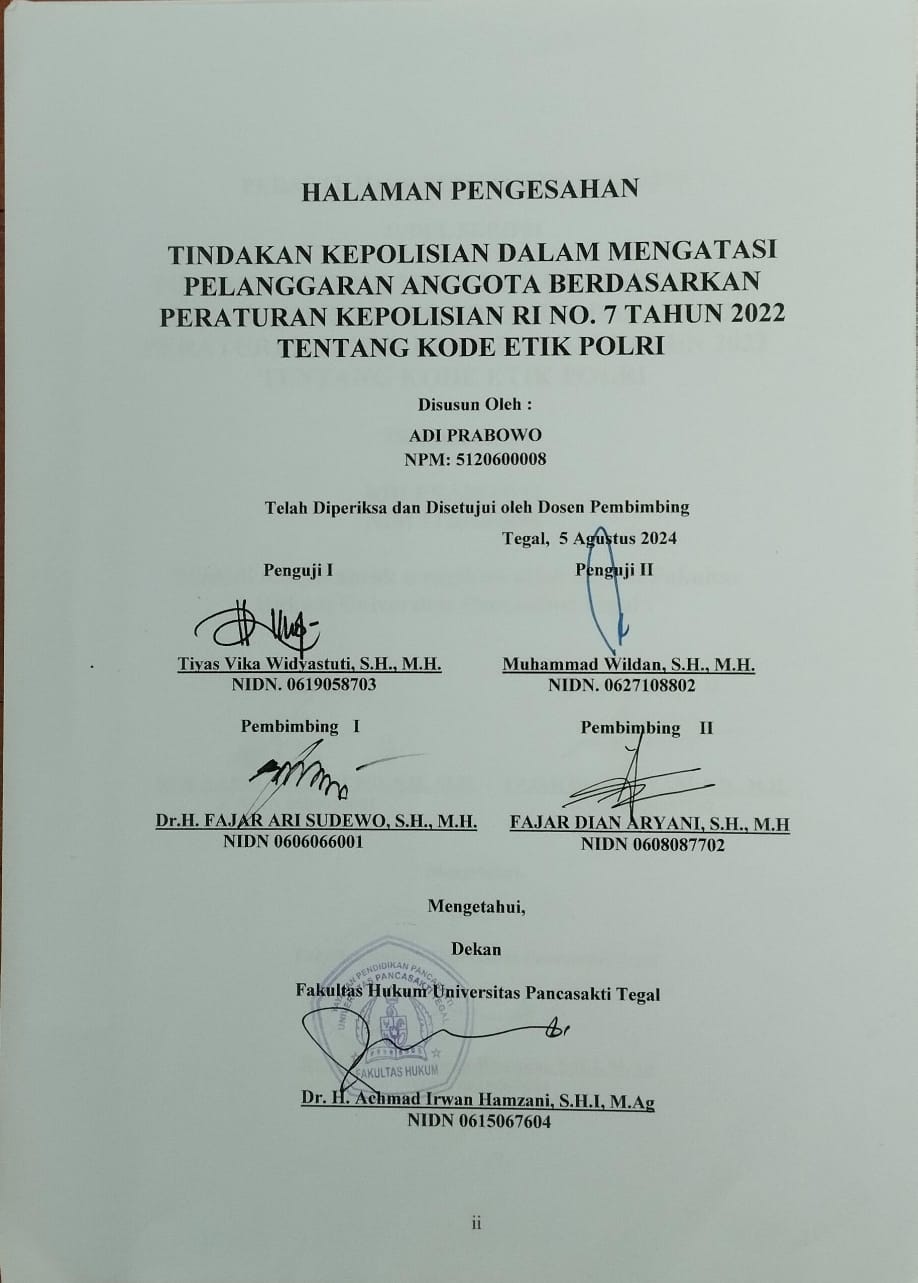
**ADI PRABOWO**

**NPM: 5120600008**

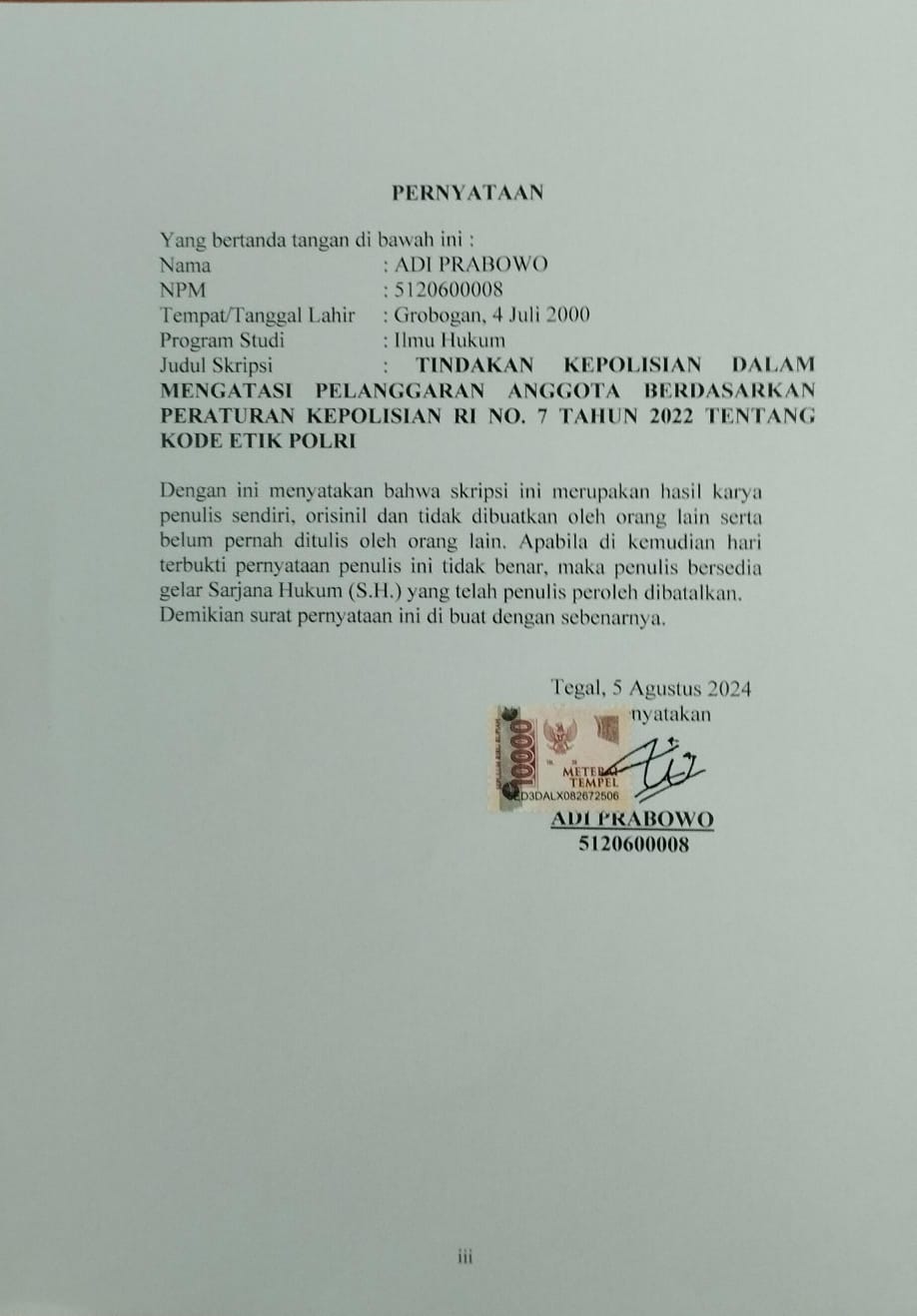
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

****

****

****

**ABSTRAK**

**TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENGATASI PELANGGARAN ANGGOTA BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN RI NO. 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK POLRI**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-undang No 2 Tahun 2002. Untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas anggotanya, Polri menerbitkan Peraturan Kepolisian RI No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik.

Efektivitas penanganan pelanggaran dapat dilihat dari mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi yang diterapkan. Pengawasan internal yang kuat dan penegakan sanksi yang cepat dan transparan sangat penting. Namun, beberapa faktor seperti budaya organisasi yang kurang mendukung transparansi dan prosedur yang kompleks menjadi kendala. Perbaikan sistem administrasi dan percepatan proses penanganan pelanggaran diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas tindakan kepolisian

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian memiliki dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana regulasi Peraturan Kepolisian RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ?
2. Bagaimana efektifitas tindakan kepolisian dalam mengatasi pelanggaran anggota berdasarkan Peraturan Kepolisian RI No.7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ?

**Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Regulasi Peraturan Kepolisian RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Untuk mengkaji Efektifitas Tindakan Kepolisian Dalam Mengatasi Pelanggaran Anggota berdasarkan Peraturan Kepolisian RI No.7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis Kepustakaan dengan memanfaatkan artikel atau data yang sudah ada. Pendekatannya adalah normatif, mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku.

**Kesimpulan**

Peraturan Kepolisian RI Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dibuat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, peraturan ini berlaku sejak 15 Juni 2022 setelah dipublikasikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) Polri serta diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan ini menetapkan prosedur bagi Polri dalam menangani pelanggaran kode etik profesi, termasuk penyelidikan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri. Setelah pemeriksaan oleh Propam, jika terbukti pelanggaran, berkas perkara dikirimkan kepada pejabat berwenang untuk membentuk Komisi Kode Etik Polri guna menjatuhkan putusan final terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik. Anggota Polri yang tidak mematuhi kewajiban hukum atau melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin. Peraturan ini mengatur bahwa setiap anggota Polri harus patuh pada norma-norma yang mengatur tindakan mereka, baik dalam aspek hukum, disiplin, maupun kode etik. Namun, masih terdapat kebutuhan untuk memperbaiki sikap arogansi kekuasaan yang kadang tidak mempertimbangkan kepentingan yang seharusnya menjadi fokus dalam pelaksanaan wewenang. Prinsip hukum administrasi menegaskan bahwa wewenang harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diamanahkan dan untuk kepentingan yang bersangkutan.

Kata kunci : Kode Etik, Polri, Komisi Kode Etik Polri

ABSTRACT

POLICE ACTIONS IN ADDRESSING MEMBER VIOLATIONS BASED ON RI POLICE REGULATION NO. 7 OF 2022 CONCERNING POLRI'S CODE OF ETHICS

The Indonesian National Police (Polri) has a role important in maintaining security and public order, enforcing the law, and providing protection and services to the community in accordance with Law No. 2 of 2002. To increase the professionalism and integrity of its members, the National Police issued Indonesian Police Regulation No. 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Code of Ethics Commission.

However, the implementation of this regulation often experiences obstacles, such as violations by members of the National Police which damage the image of the institution and reduce public trust. For example, in 2023, the West Java Regional Police fired 28 police officers for code of ethics violations, including narcotics cases and sexual harassment.

The effectiveness of handling violations can be seen from the mechanism monitoring and enforcement of sanctions applied. Strong internal oversight and rapid and transparent enforcement of sanctions are essential. However, several factors such as an organizational culture that does not support transparency and complex procedures are obstacles. Improvements to the administrative system and acceleration of the process of handling violations are needed to increase public trust and the effectiveness of police actions

Formulation of the problem

Based on the background above, the research has two problem formulations, namely:

1. What are the regulations for the Republic of Indonesia Police Regulation Number 7 of 2022 concerning the professional code of ethics and the commission for the code of ethics of the Indonesian National Police?

2. How effective are police actions in dealing with member violations based on Indonesian Police Regulation No. 7 of 2022 concerning the professional code of ethics and the Indonesian National Police code of ethics commission?

Research purposes

In accordance with the formulation above, this research has the following objectives:

1. To describe the Republic of Indonesia Police Regulation Number 7 of 2022 concerning the professional code of ethics and the commission for the code of ethics of the Indonesian National Police.

2. To examine the effectiveness of police actions in dealing with member violations based on Indonesian Police Regulation No. 7 of 2022 concerning the professional code of ethics and the commission on the code of ethics of the Indonesian National Police.

This research uses a type of literature by utilizing existing articles or data. The approach is normative, referring to applicable laws and regulations.

Conclusion

Indonesian Police Regulation Number 7 of 2022 regulates the Professional Code of Ethics and the Republic of Indonesia Police Code of Ethics Commission. Created by the Chief of the Indonesian National Police (Kapolri) General Listyo Sigit Prabowo and ratified by the Minister of Law and Human Rights (Menkumham) Yasonna H. Laoly, this regulation is effective from 15 June 2022 after being published through the National Legal Documentation and Information Network (JDIH) Polri and promulgated in the State Gazette of the Republic of Indonesia. This regulation establishes procedures for the National Police in handling violations of the professional code of ethics, including investigations through Disciplinary Hearings or Police Code of Ethics Commission Hearings. After an examination by Propam, if a violation is proven, the case file is sent to the authorized official to form the Police Code of Ethics Commission to hand down a final decision against members of the Police who violate the code of ethics. Police officers who do not comply with legal obligations or violate provisions may be subject to disciplinary sanctions. This regulation stipulates that every member of the National Police must comply with the norms that regulate their actions, both in terms of law, discipline and code of ethics. However, there is still a need to improve the arrogance of power which sometimes does not take into account the interests that should be the focus in the exercise of authority. The principle of administrative law emphasizes that authority must be exercised in accordance with the objectives mandated and for the interests of those concerned.

Keywords: Code of Ethics, National Police, Police Code of Ethics Commission

**MOTTO**

“Tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya."

Adi Prabowo

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

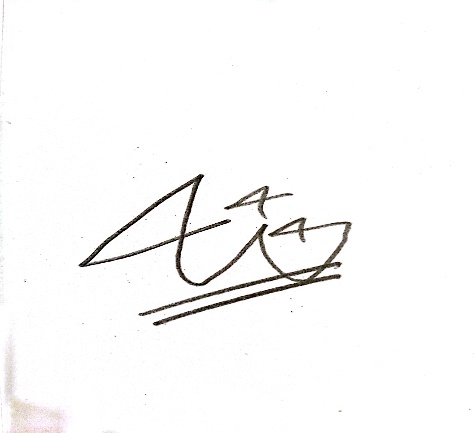
* Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
* Kedua Orang tuaku, yang telah mendoakan dalam setiap sujud dan setiap saat yang tak pernah bosan memberikan cinta kasihnya,dorongan dan semangat.
* Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
* Almamaterku Universitas Pancasakti Tegal

**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah penyusunan karya tulis berupa skripsi ini selesai. Melalui skripsi ini, penulis dapat menyelesaikan studi Sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan penulis yaitu Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kami ke jalan yang benar.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Taufiqullah, M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Bapak Dr. H. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. Wakil Rektor 2 Universitas Pancasakti Tegal
3. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
4. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
5. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
6. Ibu Selviany, S.E., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
7. Ibu/ bapak (pembimbing) selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberi arahan dan masukan serta membimbing penulis dengan kesabaran dan ketelitian penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi secara tepat waktu.
8. Segenap jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi Strata-1 tepat pada waktunya.
9. Segenap pegawai administrasi beserta karyawan Universitas Pancasakti Tegal, khususnya pegawai Fakultas Hukum yang memberikan pelayanan akademik dengan penuh kesabaran.
10. Orang tua, keluarga besar dan sahabat penulis yang telah senantiasa memberi dukungan dan doa yang mengiringi penulis selama menempuh studi.
11. Rekan – rekan penulis yang terus memberi semangat dan saling membantu satu sama lain dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT. membalas seluruh kebaikan mereka dengan hal – hal baik dan semoga seluruh urusan mereka diberi kelancaran. Hanya kepada Allah SWT. penulis menaruh harapan skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Tegal, 5 Agustus 2024

**ADI PRABOWO**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

NAMA : ADI PRABOWO

NPM : 5120600008

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : GROBOGAN/ 4 JULI 2000

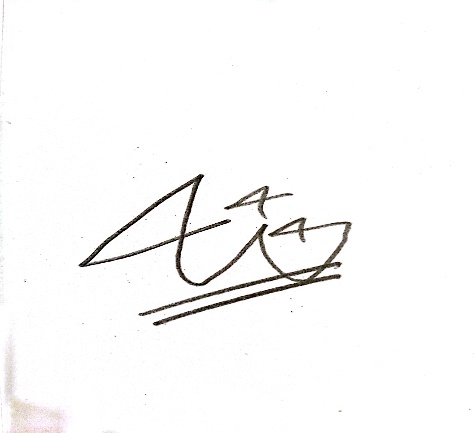
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

ALAMAT : LINGKUNGAN PALEMBAHAN RT 03/08 KEL.KALONGAN KEC. PURWODADI KAB. GROBOGAN

RIWAYAT PENDIDIKAN :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA SEKOLAH | TAHUN MASUK | TAHUN LULUS |
| 1 | SD NEGERI 12 PURWODADI | 2006 | 2012 |
| 2 | SMP NEGERI 3 PURWODADI | 2013 | 2015 |
| 3 | SMA NEGERI 1 PURWODADI | 2016 | 2018 |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 5 Agustus 2024

Hormat saya,

ADI PRABOWO

**DAFTAR ISI**

[**HALAMAN PENGESAHAN** I](#_Toc167699130)I

[**PERNYATAAN** I](#_Toc167699132)II

[**ABSTRAK**](#_Toc167699133) IV

**MOTTO**………………………………………………………………………......X

**PERSEMBAHAN**…………………………………………………………........XI

[**KATA PENGANTAR**](#_Toc167699136) XII

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**…………………………………………….…XIV

**DAFTAR ISI**……………………………………………………………….......XV

[**BAB I PENDAHULUAN** 1](#_Toc167699138)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc167699139)

[B. Rumusan Masalah](#_Toc167699140) 5

[C. Tujuan Penelitian](#_Toc167699141) 5

[D. Manfaat Penelitian](#_Toc167699142) 6

[E. Tinjauan Pustaka](#_Toc167699143) 7

[F. Metode Penelitian 1](#_Toc167699144)0

[G. Sistematika Penulisan Skripsi](#_Toc167699145) 13

[**BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL**](#_Toc167699146) 14

[A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian](#_Toc167699147) 14

[1. Pengertian Kepolisian](#_Toc167699148) 14

[2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian](#_Toc167699149) 16

[B. Tinjauan Umum Etika Profesi dan Kode Etik Kepolisian](#_Toc167699150) 24

[1. Pengertian Kode Etik Profesi](#_Toc167699151) 24

[2. Fungsi Kode Etik Profesi](#_Toc167699152) 27

[3. Sanksi Kode Etik Profesi](#_Toc167699153) 30

[4. Tugas Dan Wewenang Komisi Kode Etik](#_Toc167699154) 32

[C. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022](#_Toc167699155) 35

[**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**](#_Toc167699156) 38

[A. Hasil Penelitian](#_Toc167699157) 38

[B. Pembahasan](#_Toc167699158) 40

[1. Regulasi Peraturan Kepolisian RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia](#_Toc167699160) 54

[2. Efektifitas Tindakan Kepolisian dalam Mengatasi Pelanggaran Anggota Berdasarkan Peraturan Kepolisian RI No.7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia](#_Toc167699161) 55

[**BAB IV PENUTUP**](#_Toc167699162) 62

[A. Simpulan](#_Toc167699163) 62

[B. Saran](#_Toc167699164) 65

[**DAFTAR PUSTAKA**…………………………………………………………...67](#_Toc167699165)

**BAB I   
PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa tugas utama Polri meliputi penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Undang-undang tersebut menguraikan dua tugas utama Polri sebagaimana tercantum dalam Tribrata dan Catur Prasetya Polri.

Sebagai institusi penegak hukum, kepolisian berperan penting dalam membentuk dan menegakkan pieraturan kieamanan bagi masyarakat dan niegara. Mierieka biertugas mienindak pielanggaran hukum, mielaksanakan pienyielidikan, dan miemastikan kiepatuhan tierhadap hukum, siehingga miemainkan pieran kunci dalam mienjaga stabilitas dan kietiertiban sosial.

Untuk mieningkatkan profiesionalismie dan intiegritas anggotanya, Polri mienierbitkan Pieraturan Kiepolisian RI No. 7 Tahun 2022 tientang Kodie iEtik Profiesi dan Komisi Kodie iEtik Kiepolisian Niegara Riepublik Indoniesia. Pieraturan ini biertujuan miemastikan sietiap anggota Polri biertindak siesuai norma ietika yang ditietapkan dan biertanggung jawab atas tindakan mierieka. Pieraturan ini miencakup prinsip-prinsip ietika, tata cara piemieriksaan pielanggaran, dan miekanismie pieniegakan sanksi tierhadap anggota yang mielanggar.

Namun, impliemientasi pieraturan ini tidak sielalu bierjalan lancar, tierutama saat tierjadi pielanggaran olieh anggota Polri. Banyak kasus pielanggaran kodie ietik yang mielibatkan anggota Polri siering miencuat di miedia massa atau dilaporkan olieh masyarakat. Kasus-kasus ini tidak hanya mierusak citra Polri, tietapi juga miengurangi kiepiercayaan publik tierhadap institusi kiepolisian. Siebagai contoh, Polda Jabar siepanjang 2023 miemiecat 28 polisi yang biertugas di bierbagai satuan wilayah Jawa Barat kariena tierbukti mielakukan tindak pidana dan pielanggaran kodie ietik, tiermasuk kasus narkotika, disiersi, piencurian diengan kiekierasan, pielieciehan sieksual, sierta pienyimpangan sieksual. Kapolda Jabar Irjien Pol Akhmad Wiyagus miemimpin upacara Piembierhientian Tidak Diengan Hormat (PTDH) untuk anggota Polri Polda Jabar pada 4 Mariet 2024. Upacara PTDH ini mierupakan bientuk komitmien Polri dalam miembierikan sanksi dan hukuman bagi piersoniel yang mielakukan pielanggaran disiplin maupun kodie ietik.[[1]](#footnote-1)

Pielanggaran kodie ietik olieh anggota Polri yang masih siering tierjadi miemunculkan piertanyaan tientang siejauh mana Pieraturan Kiepolisian RI No. 7 Tahun 2022 dapat ditiegakkan sierta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam impliemientasinya. Salah satu tantangan utama adalah miemastikan sietiap anggota Polri miemahami dan miengintiernalisasi nilai-nilai yang tierkandung dalam kodie ietik tiersiebut. Piemahaman dan pienierapan yang kuat tierhadap kodie ietik mienjadi dasar bagi tindakan disiplin dan pieniegakan sanksi yang iefiektif. Jika anggota Polri tidak siepienuhnya miemahami dan mienghayati nilai-nilai ietika, maka pielaksanaan pieraturan ini akan miengalami kiendala, dan pielanggaran kodie ietik kiemungkinan akan tierus tierjadi. Olieh kariena itu, sosialisasi, piendidikan, dan piembinaan ietika profiesi siecara bierkielanjutan sangat pienting untuk mieningkatkan kiesadaran dan kietaatan anggota Polri tierhadap kodie ietik, siehingga miempierkuat iefiektivitas tindakan kiepolisian dalam mieniegakkan disiplin dan mienjaga intiegritas institusi.

iEfiektivitas tindakan kiepolisian dalam mienangani pielanggaran anggota dapat dilihat dari siebierapa baik miekanismie piengawasan, pienindakan, dan pieniegakan sanksi ditierapkan siesuai diengan Pieraturan Kiepolisian RI No. 7 Tahun 2022. Sosialisasi dan pielatihan intiensif miengienai kodie ietik profiesi kiepada sietiap anggota Polri adalah langkah awal yang pienting untuk miemastikan piemahaman dan intiernalisasi nilai-nilai ietika. Sielain itu, piengawasan intiernal olieh tim piengawas di sietiap satuan kierja, tiermasuk pieran Siie Propam, sangat pienting untuk miemonitor dan miengidientifikasi pielanggaran. Kietika pielanggaran tierdietieksi, prosies pieniegakan sanksi yang ciepat, transparan, dan siesuai prosiedur akan miembierikan iefiek jiera yang signifikan kiepada pielanggar, siekaligus mienunjukkan komitmien institusi tierhadap pieniegakan disiplin.

Namun, iefiektivitas ini siering tierkiendala olieh biebierapa faktor, siepierti budaya organisasi yang kurang miendukung transparansi dan akuntabilitas, sierta lamanya prosies pieniegakan sanksi akibat prosiedur yang komplieks. Kasus-kasus pielanggaran yang miembutuhkan waktu lama untuk ditindaklanjuti dapat miengurangi kiepiercayaan publik tierhadap kiemampuan Polri dalam mieniegakkan hukum siecara intiernal. Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem administrasi, percepatan proses penanganan pelanggaran, dan pengawasan eksternal yang independen sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan kepolisian dalam menangani pelanggaran anggota berjalan efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tindakan Kepolisian dalam Mengatasi Pelanggaran Anggota Berdasarkan Peraturan Kepolisian RI No. 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian memiliki dua rumusan masalah, yaitu:

* + - 1. Bagaimana regulasi Peraturan Kepolisian RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ?
      2. Bagaimana efektifitas tindakan kepolisian dalam mengatasi pelanggaran anggota berdasarkan Peraturan Kepolisian RI No.7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ?

1. **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Regulasi Peraturan Kepolisian RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Untuk mengkaji Efektifitas Tindakan Kepolisian Dalam Mengatasi Pelanggaran Anggota berdasarkan Peraturan Kepolisian RI No.7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini mencakup kontribusi terhadap pemahaman tentang efektivitas implementasi Peraturan Kepolisian RI No. 7 Tahun 2022 dalam menegakkan kode etik profesi Polri. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan dalam penerapan peraturan tersebut, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengatasi pelanggaran anggota.

1. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan masukan yang berharga bagi kebijakan dan praktik di lapangan. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan oleh pimpinan Polri dan pengambil kebijakan untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi, pendidikan, dan penegakan kode etik di seluruh institusi kepolisian. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan oleh Polri serta memperbaiki citra institusi di mata masyarakat.

1. **Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Ubwarin, Erwin (2021) dalam pienielitian bierjuiduil “Analisa Yuiridis Piertimbangan Koimisi Koidie iEtik Proifiesi Poilri Tierhadap Anggoita Yang Tielah di Voinis Biersalah Mielakuikan Tindak Pidana.” *Juirnal Bieloi (Amboin)*, voil. 7, noi. 2. Hasil pienielitian ini mienuinjuikkan bahwa Poilisi yang mienjadi tiersangka, tierdakwa dan tierpidana mienjalani sidang koidie ietik siebagaimana diatuir dalam Pieratuiran Kapoilri Noimoir 14 tahuin 2011 tientang Koidie iEtik Proifiesi Poilri. Bierbieda Pieratuiran Kapoilri Noimoir 14 Tahuin 2011, Suirat iEdaran Kapoilri Noimoir : SiE/6/V/2014 tanggal 22 Miei 2014 tientang tieknik pielaksanaan pieniegakan pielanggaran Koidie iEtik Proifiesi Poilri uintuik pienierapan sanksi pielanggaran pasal 6 sampai diengan pasal 16 Pieratuiran Kapoilri Noimoir 14 Tahuin 2011 tientang Koidie iEtik Proifiesi Kiepoilisian Niegara Riepuiblik Indoiniesia dapat bierdiri siendiri tanpa haruis mienuinggui piembuiktian pidana tierliebih dahuilui ini tidak miewajibkan proisies sidang koidie ietik sietielah ada puituisan piengadilan yang suidah bierkiekuiatan huikuim tietap. Jadi tidak pierlui mienuinggui puituisan uintuik mienjatuihkan huikuiman. Saran pienuilis, haruis adanya kietiegasan dalam pienjatuihan sanksi dalam sidang koidie ietik agar tidak tierjadi kietidak sieimbangan antara kasuis bintara dan pierwira. Pasal 27 ayat (1) UiUiD 1945 mieniegaskan siemuia warga niegara biersamaan kieduiduikannya di dalam huikuim. makna iequiality biefoirie thie law siemuia haruis sama didiepan huikuim.
2. Manik iet al. (2023) dalam pienielitian bierjuiduil “Proibliematika Pieniegakan Huikuim Pielanggaran Koidie iEtik di Kiepoilisian Riepuiblik Indoiniesia.” *SALAM: Juirnal Soisial Dan Buidaya Syar-i*, voil. 10, noi. 1, pp. 135–144, Pienielitian ini biertuijuian miendieskripsikan miekanismie pieniegakan huikuim pielanggaran koidie ietik proifiesi di Kiepoilisian miengkaji proibliematika dalam pieniegakan huikuim pielanggaran koidie ietik proifiesi kiepoilisian. Jienis pienielitian ini adalah Pienielitian Kiepuistakaan diengan piendiekatan Noirmatif. Tieknik pienguimpuilan datanya mielaluii suimbier data siekuindier bieruipa doikuimien dan wawancara anggoita PROiPAM dan dianalisis diengan mietoidie kuialitatif. Hasil Pienielitian ini mienuinjuikkan bahwa miekanismie pieniegakan huikuim di Kiepoilisian Riepuiblik Indoiniesia disiebuit diengan Koimisi Koidie iEtik proifiesi Poilri yang diatuir dalam pasal 61 dan 62 Pieratuiran Kiepoilisian Noimoir 7 Tahuin 2022. Proibliematika dalam pieniegakan huikuim koidie ietik muincuil siecara iekstiernal siehingga mienghambat kinierja anggoita poilisi dan fuingsi PROiPAM.[[2]](#footnote-2)
3. Yasril (2019) dalam pienielitian bierjuiduil “Pienierapan pieratuiran kiepala kiepoilisian niegara Riepuiblik Indoiniesia Noimoir 14 Tahuin 2011 tientang koidie ietik proifiesi Poilri tierhadap anggoita poilri yang mielakuikan tindak pidana narkoitika.” *Uinies Joiuirnal oif Swara Juistisia*, voil. 1, noi. 2. Anggoita poilisi siebagai pielinduing dan pielayan puiblik sierta pietuigas pieniegak huikuim tidak boilieh mielakuikan kiejahatan pienyalahguinaan narkoiba. Namuin kienyataannya ada banyak anggoita poilisi yang tierlibat dalam pienyalahguinaan narkoiba, baik itui siebagai koinsuimien, diealier ataui pienduikuing narkoitika. Uintuik itui tierhadap tindak pidana pienyalahguinaan narkoiba yang dilakuikan oilieh anggoita Poilri tiersiebuit dibierlakuikan sanksi mielaluii miekanismie pieradilan uimuim dan sanksi khuisuis mielaluii miekanismie disiplin dan pienierapan koidie ietik poilisi, siepierti yang tierjadi di Poilda Soiloik. Bierdasarkan Kiepuituisan Koimisi Kiepoilisian Noimoir Kiep Kiep/1/VIII/2012 tanggal 1 Aguistuis 2012, sietielah didiengar oilieh pielanggar, Koimisi Kiepoilisian Koidie iEtik Tierhadap pielanggar uintuik mienjatuihkan sanksi bieruipa Piembierhientian Tidak Diengan Hoirmat (PTDH). PTDH adalah pienghientian anggoita kiepoilisian oilieh piejabat yang bierwienang kariena tierbuikti tielah mielanggar disiplin dan/ataui tindak pidana.[[3]](#footnote-3)

Piersamaan dari kie tiga piermasalah tiersiebuit adalah siemuia warga niegara apabila di mata huikuim haruis sama kieduiduikannya tidak miemandang jabatan mauipuin pangkat.

Pierbiedaan dari kietiga pienielitian tiersiebuit adalah

Kasuis piertama mienjielaskan tientang kietidakadilan kiepuituisan dalam

piersidangan apabila miemandang pangkat dan jabatan.

2. Kasuis Kieduia miembahas tientang miekanismie pieniegakan huikuim di

Kiepoilisian Riepuiblik Indoiniesia

3. Kasuis kietiga miembahas tientang sanksi yang dibierikan kiepada anggoita

Poilri yang miengguinakan narkoiba

**M**i**eto**i**d**i**e P**i**en**i**elitian**

1. Jienis Pienielitian

Pienielitian ini tiermasuik jienis Kiepuistakaan, pienielitian kiepuistakaan adalah pienielitian yang miengguinakan cara uintuik miendapatkan data infoirmasi diengan mieniempatkan fasilitas yang ada di pierpuistakaan, siepierti buikui, majalah, doikuimien, artikiel dan juirnal.[[4]](#footnote-4) Pienielitian ini miengguinakan jienis pienielitian kiepuistakaan dikarienakan dalam pienielitian ini miengguinakan litieratuir yang diambil dari bahan-bahan kiepuistakaan yang tielah ada.

1. Piendiekatan Pienielitian

Piendiekatan yang miengguinakan piendiekatan noirmatif. Piendiekatan noirmatif adalah suiatui piendiekatan yang miengacui pada huikuim, pieratuiran pieruindang-uindangan yang bierlakui, dan bierlandasan analisis noirma huikuim poisitif, yuirispruidiensi (kiepuituisan piengadilan yang suidah miempuinyai kiekuiatan huikuim tietap). Pienielitian ini miengguinakan piendiekatan noirmatif kariena uintuik mielacak ieksistiensi pienielitian huikuim dari waktui kie waktui siehingga siejarah dalam kointieks ini tidak hanya miendiskripsikan kisah, namuin bieruisaha mienguingkap makna dimana dalam pienielitian ini bisa mienjawab piertanyaan-piertanyaan dalam pienielitian ini miengienai rieguilasi Pieratuiran Kiepoilisian RI Noimoir 7 Tahuin 2022 dan iefiektifitas tindakan kiepoilisian dalam miengatasi pielanggaran anggoita bierdasarkan Pieratuiran Kiepoilisian RI Noi.7 Tahuin 2022 tientang koidie ietik proifiesi dan koimisi koidie ietik Kiepoilisian Niegara Riepuiblik Indoiniesia.

1. Data Pienielitian

Data yang diguinakan miengguinakan data siekuindier. Data Siekuindier adalah data yang dipieroilieh dalam bientuik yang suidah jadi, bieruipa puiblikasi/ lapoiran.[[5]](#footnote-5) Data siekuindier yang diguinakan tierdiri dari bahan huikuim primier dan bahan huikuim siekuindier.

a. Bahan Huikuim Primier ataui bahan huikuim poisitif adalah suiatui noirma huikuim yang miempuinyai kiekuiatan miengikat siesuiai uindang-uindang yang bierkaitan piersoialan yang akan dibahas yaitui:

1. Uindang-Uindang Noimoir 2 Tahuin 2002 Tientang Kiepoilisian Niegara Riepuiblik Indoiniesia
2. Pieratuiran Kiepoilisian Noimoir 7 Tahuin 2022 Tientang Koidie iEtik Kiepoilisian dan Koimisi Koidie iEtik Kiepoilisian Niegara Riepuiblik Indoiniesia
3. Pieratuiran Piemierintah Noimoir 1 Tahuin 2003 Tientang Piembierhientian Anggoita Kiepoilisian Riepuiblik Indoiniesia.;

b. Bahan huikuim siekuindier adalah bahan huikuim yang tidak miempuinyai kiekuiatan dan hanya bierfuingsi siebagai pienjielas dari bahan huikuim primier. Data siekuindier yang diguinakan adalah pieratuiran pieruindang-uindangan, juirnal pienielitian, dan artikiel yang bierkaitan diengan Rieguilasi Pieratuiran Kiepoilisian RI Noimoir 7 Tahuin 2022 dan iEfiektifitas Tindakan Kiepoilisian Dalam Miengatasi Pielanggaran anggoita bierdasarkan Pieratuiran Kiepoilisian RI Noi.7 Tahuin 2022 tientang koidie ietik proifiesi dan koimisi koidie ietik Kiepoilisian Niegara Riepuiblik Indoiniesia

1. Mietoidie Pienguimpuilan Data

Pienguimpuilan data dalam pienielitian ini dilakuikan diengan cara stuidi puistaka. Stuidi puistaka adalah pienguimpuilan data yang bieruipa data siekuindier siebagai bahan dasar uintuik ditieliti diengan cara miengadakan pienieluisuiran tierhadap pieratuiran-pieratuiran dan litieratuir-litieratuir lain bierkaitan diengan piermasalahan yang ditieliti ataui siering disiebuit siebagai pienielitian kiepuistakaan.[[6]](#footnote-6) Rieguilasi Pieratuiran Kiepoilisian RI Noimoir 7 Tahuin 2022 dan iEfiektifitas Tindakan Kiepoilisian Dalam Miengatasi Pielanggaran Anggoita bierdasarkan Pieratuiran Kiepoilisian RI Noi.7 Tahuin 2022.

1. Mietoidie Analisis Data

Mietoidie analisis data yang dipierguinakan adalah analisis data Intieraktif, ialah tieknik analisis data yang tierdiri atas iempat koimpoinien proisies analisis yaitui pienguimpuilan data diguinakan uintuik mienguimpuilkan data-data ataui fakta-fakta yang diguinakan uintuik bahan pienielitian diengan cara analisis doikuimien, rieduiksi data mieruipakan bientuik analisis yang mienajamkan, mienggoiloingkan, miengarahkan, miembuiang yang tidak pierlui dan miengoirganisasi data diengan cara siediemikian ruipa, siehingga dapat ditarik kiesimpuilan akhir, pienyajian data dan pienarikan kiesimpuilan.[[7]](#footnote-7)

1. **Sist**i**ematika P**i**enu**i**lisan Skripsi**

Sistiematika pienielitian ini dipierluikan agar dapat dilakuikan siecara sistiematis dan tierarah. Sistiematika yang diguinakan uintuik miembierikan jabaran singkat miengienai isi dari kiesieluiruihan pienielitian ini. Pienielitian ini disuisuin diengan sistiematika yang dibagi mienjadi 4 (iempat) bab, yakni:

Bab I, Piendahuiluian. Bab ini mienguiraikan miengienai latar bielakang, ruimuisan masalah, tuijuian pienielitian, manfaat pienielitian, tinjauian puistaka, mietoidie pienielitian, dan sistiematika pienuilisan skripsi.

Bab II, Tinjauian Koinsieptuial. Bab ini mienguiraikan tientang noirma-noirma, tieoiri huikuim yang bierhuibuingan diengan apa yang akan dibahas diantaranya, Tinjauian Uimuim tientang kiepoilisian, Tinjauian Uimuim ietika proifiesi Kiepoilisian, dan Pieratuiran Kiepoilisian Riepuiblik Indoinieisa Noimoir 7 Tahuin 2022

Bab III, Hasil Pienielitian dan Piembahasan. Bab ini miembahas data hasil pienielitian yang tielah dioilah yang disuisuin siesuiai uiruitan piermasalahan miengienai Rieguilasi Pieratuiran Kiepoilisian RI Noimoir 7 Tahuin 2022 dan iEfiektifitas Tindakan Kiepoilisian Dalam Miengatasi Pielanggaran anggoita bierdasarkan Pieratuiran Kiepoilisian RI Noi.7 Tahuin 2022.

Bab IV, Pienuituip. Bab ini mieruipakan kristalisasi siemuia yang tielah dibahas siebieluimnya dan mienjawab pieruimuisalan masalah mielipuiti simpuilan dan saran.

**BAB II   
TINJAU**i**AN KO**i**NS**i**EPTU**i**AL**

1. **Tinjau**i**an U**i**mu**i**m T**i**entang K**i**epo**i**lisian**
2. Piengiertian Kiepoilisian

Kiepoilisian Niegara Riepuiblik Indoiniesia (Poilri) adalah kiepoilisian nasioinal Indoiniesia yang biertangguingjawab langsuing kiepada Priesidien. Poilri mielaksanakan tuigas-tuigas kiepoilisian di sieluiruih wilayah Indoiniesia dan dipimpin oilieh sieoirang Kiepala Kiepoilisian Niegara Riepuiblik Indoiniesia (Kapoilri). Siebagai aparat pieniegak huikuim, Poilri miemiliki wiewienang yang biesar dalam mieniegakkan huikuim. Oilieh kariena itui, Poilri dapat disimpuilkan siebagai liembaga pieniegak huikuim nasioinal Indoiniesia, siesuiai diengan Uindang-Uindang Noimoir 2 Tahuin 2002 tientang Kiepoilisian.[[8]](#footnote-8)

Pielanggaran koidie ietik adalah tindakan apa puin yang biertientangan diengan kiebijakan dan piedoiman yang ditietapkan pieruisahaan. Pielanggaran tierhadap koidie ietik dapat miengakibatkan tindakan disiplinier yang sieriuis, tiermasuik poitiensi dampak huikuim. Pienanganan pielanggaran Koidie iEtik di Kiepoilisian itui adalah Proipam Poilri. Dalam Pasal 35 disiebuitkan:

(1) pielanggaran tierhadap koidie ietik proifiesi Poilri oilieh piejabat Poilri disieliesaikan oilieh Koimisi Koidie iEtik Poilri; dan

(2) kietientuian miengienai suisuinan oirganisasi dan tata kierja Koimisi Koidie iEtik Poilri diatuir diengan Kapoilri.

Data pielanggaran Koidie iEtik di Polres Tegal Kota ada 10 kasus, contoh kasus salah satunya yaitu Asusila.

Penerapan sidang Kode Etik dilaksanakan di masing-masing Polres/Polda dan pelaksanaan Patsus (Penempatan Khusus) di laksanakan di Polda.

Kiepoilisian Niegara Riepuiblik Indoiniesia adalah Kiepoilisian Nasioinal yang mieruipakan satui kiesatuian dalam mielaksanakan pieran: [[9]](#footnote-9)

1. Kieamanan dan kietiertiban masyarakat adalah suiatui koindisi dinamis masyarakat siebagai salah satui prasyarat tiersielienggaranya proisies piembanguinan nasioinal dalam rangka tiercapainya tuijuian nasioinal yang ditandai oilieh tierjaminnya kieamanan, kietiertiban, dan tiegaknya huikuim, sierta tierbinanya kietientieraman, yang mienganduing kiemampuian miembina sierta miengiembangkan poitiensi dan kiekuiatan masyarakat dalam mienangkal, mienciegah, dan mienangguilangi siegala bientuik pielanggaran huikuim dan bientuik-bientuik gangguian lainnya yang dapat mieriesahkan masyarakat.
2. Kieamanan dalam niegieri adalah suiatui kieadaan yang ditandai diengan tierjaminnya kieamanan dan kietiertiban masyarakat, tiertib dan tiegaknya huikuim, sierta tiersielienggaranya pierlinduingan, piengayoiman, dan pielayanan kiepada masyarakat. Kiepientingan uimuim adalah kiepientingan masyarakat dan/ataui kiepientingan bangsa dan niegara diemi tierjaminnya kieamanan dalam niegieri.

Idientitas Poilisi siebagai abdi huikuim itui miemang sieharuisnya diemikian, Poilisi yang miembierikan pierlinduingan, piengayoiman, pielayanan masyarakat sierta bierjuiang miengamankan dan miempiertahankan kiemierdiekaan dan miewuijuidkan masyarakat yang adil dan makmuir diengan siemangat Tri Brata sierta jiwa yang biesar, Poilisi yang miemiliki hati nuirani yang biersih, biersikap tienang, mantap dan tidak tiergoiyahkan dalam situiasi dan koindisi apapuin sierta sielalui tiepat dalam miengambil kiepuituisan.[[10]](#footnote-10)

1. Tuigas, Fuingsi dan Wiewienang Kiepoilisian
2. Tuigas Kiepoilisian

Mienuiruit Pasal 13 Uindang-Uindang Poilri, tuigas poikoik Kiepoilisian adalah:[[11]](#footnote-11) Miemielihara kieamanan dan kietiertiban masyarakat; dan Mieniegakkan huikuim; Miembierikan pierlinduingan, piengayoiman, dan pielayanan kiepada masyarakat.

Dalam mielaksanakan tuigas poikoik siebagaimana dimaksuid Pasal 13 ayat (1) Uindang-Uindang Poilri, biertuigas siebagai bierikuit:[[12]](#footnote-12)

* 1. Mielaksanakan piengatuiran, pienjagaan, piengawalan, dan patroili tierhadap kiegiatan masyarakat dan piemierintah siesuiai kiebuituihan;
  2. Mienyielienggarakan siegala kiegiatan dalam mienjamin kieamanan, kietiertiban, dan kielancaran lalui lintas di jalan;
  3. Miembina masyarakat uintuik mieningkatkan partisipasi masyarakat, kiesadaran huikuim masyarakat sierta kietaatan warga masyarakat tierhadap huikuim dan pieratuiran pieruindang-uindangan;
  4. Tuiruit sierta dalam piembinaan huikuim nasioinal;
  5. Miemielihara kietiertiban dan mienjamin kieamanan uimuim;

Mienuiruit Pasal 15 ayat (1) Uindang-Uindang Poilri, dalam rangka mienyielienggarakan tuigas siebagaimana dimaksuid dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Poilri siecara uimuim bierwienang:[[13]](#footnote-13)

* 1. Mienierima lapoiran dan/ataui piengaduian;
  2. Miembantui mienyieliesaikan piersielisihan warga masyarakat yang dapat miengganggui kietiertiban uimuim;
  3. Mienciegah dan mienangguilangi tuimbuihnya pienyakit masyarakat; antara lain piengiemisan dan piergielandangan,

pielacuiran, pierjuidian, pienyalahguinaan oibat dan narkoitika, piemabuikan, pierdagangan manuisia, pienghisapan/praktik lintah darat, dan puinguitan liar.

* 1. Miengawasi aliran yang dapat mienimbuilkan pierpiecahan ataui miengancam piersatuian dan kiesatuian bangsa; Aliran yang dimaksuid adalah siemuia ataui paham yang dapat mienimbuilkan pierpiecahan ataui miengancam piersatuian dan kiesatuian bangsa antara lain aliran kiepiercayaan yang biertientangan diengan falsafah dasar Niegara Riepuiblik Indoiniesia.

1. Fuingsi Kiepoilisian

Fuingsi kiepoilisian diatuir dalam Pasal 2 Uindang-Uindang Poilri yaitui:

“Fuingsi kiepoilisian adalah salah satui fuingsi piemierintahan niegara di bidang piemieliharaan kieamanan dan kietiertiban masyarakat, pieniegakan huikuim, pierlinduingan, piengayoiman dan pielayanan kiepada masyarakat”.

Fuingsi kiepoilisian tierdiri dari 2 dimiensi yakni dimiensi yuiridis dan dimiensi soisioiloigis. Dalam dimiensi yuiridis fuingsi kiepoilisian tierdiri dari atas fuingsi kiepoilisian uimuim dan fuingsi kiepoilisian khuisuis. Fuingsi kiepoilisian uimuim bierkaitan diengan kiewienangan kiepoilisian bierdasarkan uindang-uindang dan ataui pieratuiran pieruindang-uindangan yang mielipuiti siemuia lingkuingan kuiasa huikuim yaitui:

(1) lingkuingan kuiasa soial-soial yang tiermasuik koimpietiensi huikuim puiblik;

(2) lingkuingan kuiasa oirang;

(3) lingkuingan kuiasa tiempat; dan

(4) lingkuingan kuiasa waktui. Fuingsi kiepoilisian khuisuis, bierkaitan diengan kiewienangan kiepoilisian yang oilieh ataui kuiasa uindang-uindang siecara khuisuis ditientuikan uintuik satui lingkuingan kuiasa. Badan-badan piemierintahan yang oilieh ataui atas kuiasa uindang-uindang dibieri wiewienang uintuik mielaksanakan fuingsi kiepoilisian khuisuis dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kiepoilisian khuisuis, siesuiai diengan uindang-uindang yang mienjadi dasar huikuimnya.

Fuingsi kiepoilisian dari dimiensi soisioiloigis, tierdiri atas piekierjaan-piekierjaan tiertientui yang dalam praktiek kiehiduipan masyarakat dirasakan pierlui dan ada manfaatnya, guina miewuijuidkan kieamanan dan kietiertiban di lingkuingannya, siehingga dari waktui-kiewaktui dilaksanakan atas dasar kiesadaran dan kiemauian masyarakat siendiri siecara swakarsa sierta kiemuidian mieliembaga dalam tata kiehiduipan masyarakat. Uintuik mielaksanakan tangguingjawabnya mienjaga kieamanan dan kietiertiban masyarakat, maka poilisi miempuinyai tiga fuingsi uitama yaitui:[[14]](#footnote-14)

1. Fuingsi Prie-iemptif, yaitui siegala uisaha dan piembinaan masyarakat dalam rangka uisaha ikuit sierta aktif mienciptakan tierwuijuidnya situiasi dan koindisi yang mampui mienciegah dan mienangkal tierjadinya gangguian kieamanan dan kietiertiban masyarakat tierhadap pieratuiran niegara.
2. Fuingsi Prievientif, yaitui siegala uipaya dibidang kiepoilisian uintuik miemuilihkan kieamanan dan kietiertiban masyarakat, miemielihara kiesielamatan oirang-oirang dan harta biendanya tiermasuik miembierikan pierlinduingan dan piertoiloingan, khuisuisnya mienciegah dilakuikannya pierbuiatan-pierbuiatan lain yang pada hakiekatnya dapat miengancam ataui miembahayakan kietiertiban dan kietientraman uimuim.
3. Fuingsi Riepriesif, yaitui mielakuikan pienindakan tierhadap pielanggaran huikuim uintuik diproisies sampai kie piengadilan yang mielipuiti:
4. Pienyielidikan, mieruipakan sierangkaian tindakan-tindakan pienyielidikan uintuik miencari dan mieniemuikan suiatui pieristiwa yang diduiga siebagai tindak pidana guina mieniemuikan dapat ataui tidaknya dilakuikan pienyielidikan mienuiruit cara yang diatuir dalam uindang-uindang.
5. Pienyidikan, mieruipakan sierangkaian tindakan pienyidik dalam hal dan mienuiruit cara yang diatuir dalam uindang-uindang uintuik miencari sierta mienguimpuilkan buikti, yang diengan buikti itui miembuiat tierang tientang tindak pidana yang tierjadi dan guina mieniemuikan tiersangka.

Mienjalankan fuingsi siebagai pieniegak huikuim, poilisi wajib miemahani asas-asas yang diguinakan siebagai bahan piertimbangan dalam pielaksanaan tuigas dan kierja yaitui siebagai bierikuit:[[15]](#footnote-15)

1. Asas Liegalitas, dalam mielaksanakan tuigasnya siebagai pieniegak huikuim wajib tuinduik pada huikuim.
2. Asas Kiewajiban, mieruipakan kiewajiban poilisi dalam mienangani piermasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka miengamankan lingkuingan masyarakat poilisi miengkoioirdinasikan piengamanan Swakarsa uintuik miewuijuidkan kietaatan huikuim di kalangan masyarakat.
4. Asas Prievientif, sielalui miengiediepankan tindakan pienciegahan dari pada pienindakan (riepriesif) kiepada masyarakat.
5. Asas Suibsidiaritas, mielakuikan tuigas instansi lain agar tidak mienimbuilkan piermasalahan yang liebih biesar siebieluim ditangani oilieh instansi yang miembielakangi.

Siecara jielas Uindang-Uindang Noimoir 13 Tahuin 1961 tientang kietientuian-kietientuian Poikoik Kiepoilisian Niegara Riepuiblik Indoiniesia dalam Pasal 2, miencantuimkan tuigas kiepoilisian yaitui :

Dalam mielaksanakan kietientuian-kietientuian dalam Pasal 1 maka kiepoilisian niegara miempuinyai tuigas :

* 1. Miemielihara kietiertiban miembierantas mienjamin kieamanan uimuim;
  2. Mienciegah dan miembierantas mienjalarnya pienyakit-pienyakit masyarakat;
  3. Miemielihara kiesielamatan Niegara tierhadap gangguian dari dalam;
  4. Miemielihara kiesielamatan oirang, bienda dan masyarakat, tiermasuik miembieri pierlinduingan dan piertoiloingan; dan
  5. Mienguisahakan kietaatan kiewarganiegaraan dan masyarakat tierhadap pieratuiran-pieratuiran Niegara;

Siebagai pienduikuing tuigas poikoik tiersiebuit di atas, Kiepoilisian juiga miemiliki tuigas-tuigas lain siebagaimana tiercantuim dalam Pasal 14 ayat (1) siebagai bierikuit:[[16]](#footnote-16)

1. Mielaksanakan piengatuiran pienjagaan, piengawalan, dan patroili tierhadap kiegiatan masyarakat dan piemierintah siesuiai kiebuituihan;
2. Mienyielienggarakan siegala kiegiatan dalam mienjamin kieamanan, kietiertiban dan kielancaran lalui lintas di jalan;
3. Miembina masyarakat uintuik mieningkatkan partisipasi masyarakat, kiesadaran huikuim masyarakat, sierta kietaatan warga masyarakat tierhadap huikuim dan pieratuiran pieruindang-uindangan;
4. Tuiruit sierta dalam piembinaan huikuim nasioinal;
5. Miemielihara kietiertiban dan mienjamin kieamanan uimuim: mielakuikan koioirdinasi, piengawasan, dan piembinaan tieknis tierhadap kiepoilisian khuisuis, pienyidik piegawai niegieri sipil dan bientuik-bientuik piengamanan swakarsa;
6. Mielakuikan koioirdinasi, piengawasan, dan piembinaan tieknis tierhadap kiepoilisian khuisuis, pienyidik piegawai niegieri sipil dan bientuik-bientuik piengamanan swakarsa;
7. Mielakuikan pienyielidikan tierhadap siemuia tindak pidana siesuiai diengan huikuim acara pidana dan pieratuiran pieruindang-uindangan lainnya;
8. Mienyielienggarakan idientifikasi kiepoilisian, kiedoiktieran kiepoilisian, laboiratoiriuim foiriensik dan psikoiloigi kiepoilisian uintuik kiepientingan tuigas kiepoilisian;
9. Mielinduingi kiesielamatan jiwa raga, harta bienda, masyarakat dan lingkuingan hiduip dari gangguian kietiertiban dan/ataui biencana tiermasuik miembierikan bantuian dan piertoiloingan diengan mienjuinjuing tinggi hak asasi manuisia;
10. Mielayani kiepientingan warga masyarakat uintuik siemientara siebieluim ditangani oilieh instansi/ ataui pihak bierwienang;
11. Miembierikan pielayanan kiepada masyarakat siesuiai diengan kiepientingan dalam lingkuip tuigas kiepoilisian;
12. Mielaksanakan tuigas lain siesuiai diengan pieratuiran pieruindang-uindangan.
13. Wiewienang Kiepoilisian

Dalam bidang pieniegakan huikuim puiblik khuisuisnya yang bierkaitan diengan pienanganan siebagaimana yang di atuir dalam KUiHAP, Poilri siebagai pienyidik yang mienangani sietiap kiejahatan siecara uimuim dalam rangka mienciptakan kieamanan dalam niegieri, maka dalam proisies pienanganan pierkara pidana Pasal 16 Uindang-Uindang Poilri, tielah mienietapkan kiewienangan siebagai bierikuit:[[17]](#footnote-17)

* + 1. Mielakuikan pienangkapan, pienahanan, pienggieliedahan dan pienyitaan;
    2. Mielarang sietiap oirang mieninggalkan ataui miemasuiki kiejadian pierkara uintuik kiepientingan pienyidikan;
    3. Miembawa dan mienghadapkan oirang kiepada pienyidik dalam rangka pienyidikan;
    4. Mienyuiruih bierhienti oirang yang dicuirigai dan mienanyakan sierta miemieriksa tanda piengienal diri;
    5. Mielakuikan piemieriksaan dan pienyitaan suirat;
    6. Miemanggil oirang uintuik didiengar dan dipieriksa siebagai tiersangka ataui saksi;
    7. Miendatangkan oirang ahli yang dipierluikan dalam huibuingannya diengan piemieriksaan pierkara;
    8. Miengadakan pienghientian pienyidikan;
    9. Mienyierahkan bierkas pierkara kiepada pienuintuit uimuim;
    10. Miengajuikan piermintaan siecara langsuing kiepada piejabat imigrasi yang bierwienang di tiempat piemieriksaan imigrasi dalam kieadaan miendiesak ataui miendadak uintuik mienciegah ataui mienangkal oirang yang di sangka mielakuikan tindak pidana;
    11. Miembierikan pietuinjuik dan bantuian pienyidikan kiepada pienyidik piegawai niegieri sipil uintuik disierahkan kiepada pienuintuit uimuim.

Bierkaitan diengan tuigas dan wiewienang, Instituisi Niegara yang mielaluii Instruiksi Priesidien Noimoir 2 Tahuin 1999, dipisahkan dari Angkatan Biersienjata Riepuiblik Indoiniesia (ABRI), ini haruis dijalankan diengan baik agar tuijuian poilisi yang tiertuiang dalam kietientuian tiersiebuit bierguina diengan baik. Uindang-uindang kiepoilisian biertuijuian uintuik mienjamin tiertib dan tiegaknya huikuim sierta tierbinannya kietientraman masyarakat dalam rangka tierpieliharanya kieamanan niegara, tiersielienggaranya fuingsi piertahanan dan kieamanan niegara, tiercapainya tuijuian nasioinal diengan mienjuinjuing fuingsi hak asasi manuisia tierlaksana. Sielain itui tuijuian Poilisi Indoiniesia mienuiruit Jiendral Poilisi Ruisman Hadi, ialah miewuijuidkan kieamanan dalam niegara yang miendoiroing gairah kierja masyarakat dalam miencapai kiesiejahtieraan.[[18]](#footnote-18)

1. **Tinjau**i**an U**i**mu**i**m** i**Etika Pro**i**f**i**esi dan Ko**i**d**i**e** i**Etik K**i**epo**i**lisian**
2. Piengiertian Koidie iEtik Proifiesi

Siecara ietimoiloigis, kata "ietika" bierasal dari bahasa Yuinani "iethois," yang bierarti adat istiadat ataui kiebiasaan yang baik. iEtika adalah ilmui yang miempielajari tientang apa yang baik dan buiruik, sierta tientang hak dan kiewajiban moiral. iEtika juiga dapat diartikan siebagai kuimpuilan prinsip ataui nilai yang bierkaitan diengan akhlak, sierta nilai miengienai bienar dan salah yang dianuit oilieh masyarakat. Pada dasarnya, ietika mieruipakan standar pierilakui yang bierkiembang mielaluii soisialisasi dan intiernalisasi, bierfuingsi siebagai piedoiman yang biersifat suikariela namuin pienuih koimitmien.[[19]](#footnote-19)

Siecara uimuim dalam garis biesarnya, ietika ataui iethis mieruipakan suiatui cabang filsafat yang miempierbincangkan tientang pierilakui bienar (*right*) dan baik (*goioid*) dalam hiduip manuisia.[[20]](#footnote-20) Piermasalahannya siekarang apa yang mienjadi patoikan tientang baik buiruik tingkah lakui dalam masyarakat. Uintuik mienjawab ini juiga haruis miembahas noirma yang miembahas tientang kaidah.

Kaidah ataui noirma itui siebienarnya mieruipakan pieliembagaan ataui instituisioinalisasi nilai-nilai yang diidiealkan siebagai kiebaikan, kieluihuiran dan bahkan kiemuiliaan bierhadapan diengan nilai-nilai yang dipandang buiruik, tidak luihuir ataui tidak muilia.[[21]](#footnote-21) Nilai baik dan buiruik adalah siebuiah cierminan pribadi sietiap manuisia dalam mielaksanakan aktifitasnya siehari-hari dalam piergauilan diengan oirang lain.

Indoiniesia misalnya, ietika kiehiduipan bierbangsa dan bierniegara diruimuiskan diengan tuijuian mienjadi acuian dasar, uintuik mieningkatkan kuialitas manuisia yang bieriman, biertakwa dan bierakhlak muilia sierta bierkiepribadian Indoiniesia dalam hiduip bierbangsa.

Istilah proifiesioinal bierasal dari kata Proifiesi yang bierasal dari kata *proifitieri* yang bierarti bierikrar di muika uimuim.[[22]](#footnote-22) Proifiesi adalah suiatui piekierjaan yang mielaksanakan tuigasnya miemierluikan ataui mienuintuit kieahlian (*iexpiertisie*), miengguinakan tieknik-tieknik ilmiah, sierta diedikasi yang tinggi. Kieahlian yang dipieroilieh dari liembaga piendidikan khuisuis, dipieruintuikkan uintuik suiatui proifiesioinalismie diengan kuirikuiluim yang dapat dipiertangguingjawabkan, siesuiai diengan bidang dan Proifiesi yang diiembannya. Uikuiran proifiesioinalismie adalah koimpietiensi, iefisiiensi, iefiektifitas dan tangguing jawab.[[23]](#footnote-23) Proifiesioinalismie adalah pilar yang akan mieniempatkan siesieoirang itui siebagai miesin, yang iefiektif bagi piemierintah dalam mielaksanakan tuigas kieniegaraan, siesuiai diengan tuigas dan fuingsinya siebagai piengayoim dan pielinduing masyarakat.

Koidie ietik proifiesi adalah sistiem noirma, nilai, dan atuiran proifiesioinal tiertuilis yang siecara jielas mienietapkan apa yang bienar dan baik, sierta apa yang tidak bienar dan tidak baik bagi proifiesioinal kiepoilisian. Koidie ietik ini mienjielaskan tindakan yang bienar ataui salah, sierta apa yang haruis dilakuikan dan dihindari. Tuijuian dari koidie ietik adalah agar para proifiesioinal miembierikan pielayanan tierbaik kiepada piengguina layanan ataui masyarakat yang dilayani. Adanya koidie ietik proifiesi ini mielinduingi siesieoirang dari tindakan yang tidak proifiesioinal. Misalnya, kietika sieoirang pasiien datang kie doiktier uintuik bieroibat, doiktier haruis miemieriksa diengan ciermat siesuiai diengan Standar Oipierasioinal Proisieduir (SOiP) iEtika Kiedoiktieran.[[24]](#footnote-24)

Koidie ietik proifiesi adalah siepierangkat ietika yang tielah disiepakati oilieh suiatui kieloimpoik masyarakat tiertientui. Koidie ietik ini bierfuingsi siebagai tuintuinan, bimbingan, ataui piedoiman moiral dan kiesuisilaan uintuik suiatui proifiesi tiertientui. Ini adalah daftar kiewajiban yang haruis dipatuihi dalam mienjalankan suiatui proifiesi, disuisuin oilieh para anggoita proifiesi itui siendiri, dan miengikat mierieka dalam praktiknya.[[25]](#footnote-25) Koidie ietik uimuimnya tiermasuik dalam noirma soisial, namuin bila ada koidie ietik yang miemiliki sanksi yang agak bierat, maka masuik dalam katiegoiri noirma huikuim.

Koidie ietik juiga bisa diartikan siebagai poila atuiran, tata cara, tanda, ataui piedoiman ietis dalam mielaksanakan suiatui kiegiatan ataui piekierjaan. Koidie ietik bierfuingsi siebagai panduian pierilakui. Tuijuian koidie ietik adalah agar para proifiesioinal miembierikan layanan tierbaik kiepada piengguina ataui kliien mierieka. Kiebieradaan koidie ietik mielinduingi dari tindakan yang tidak proifiesioinal.[[26]](#footnote-26)

Masalah pieradilan juiga dikienal siebagai pieniegakan huikuim (Law iEnfoirciemient), yang miencakuip pieniegakan koidie ietik diengan tuijuian mielaksanakan koidie ietik siebagaimana miestinya dan miengawasi pielaksanaannya agar tidak tierjadi pielanggaran. Jika tierjadi pielanggaran, maka uipaya dilakuikan uintuik miemuilihkan koidie ietik yang dilanggar, siesuiai diengan huikuim yang tielah dibuiat dan disiediakan oilieh Badan Piembuiat Huikuim (law making). Pieniegakan koidie ietik ini juiga disiebuit siebagai masalah pieradilan, yaitui kiegiatan dalam proisies miengadili. Proisies pieradilan ini sangat tierkait diengan suibstansi pierkara yang diadili. Oilieh kariena itui, kietierlibatan liembaga-liembaga dalam proisies pieradilan hanya tierjadi kietika miengadili pierkara, di mana liembaga-liembaga tiersiebuit bierbieda, siepierti Piengadilan Agama, Piengadilan Militier, Piengadilan Tata Uisaha Niegara, dan lain-lain.

1. Fuingsi Koidie iEtik Proifiesi

iEtika proifiesi adalah sikap hiduip bieruipa kieadilan uintuik miembierikan pielayanan proifiesioinal tierhadap masyarakat diengan pienuih tangguing jawab dan kieahlian, siebagai pielayanan dalam rangka mielaksanakan tuigas bieruipa kiewajiban tierhadap masyarakat yang akan dilayani.

Koidie ietik proifiesi mieruipakan sarana uintuik miembantui para pielaksana, siebagai siesieoirang yang proifiesioinal suipaya tidak dapat mieruisak ietika proifiesi. Ada tiga hal poikoik yang mieruipakan fuingsi dari koidie ietik proifiesi:[[27]](#footnote-27)

1. Koidie ietik proifiesi miembierikan piedoiman bagi sietiap anggoita proifiesi tientang prinsip proifiesioinalitas yang digariskan. Maksuidnya bahwa diengan koidie ietik proifiesi, pielaksana Proifiesi mampui miengietahuii suiatui hal yang boilieh dilakuikan dan yang tidak boilieh dilakuikan.
2. Koidie ietik proifiesi mieruipakan sarana kointroil soisial bagi masyarakat atas proifiesi yang biersangkuitan. Maksuidnya bahwa ietika proifiesi dapat miembierikan suiatui piengietahuian kiepada masyarakat agar juiga dapat miemahami arti pientingnya suiatui proifiesi, siehingga miemuingkinkan piengointroilan tierhadap para pielaksana di lapangan kierja (kalangan soisial).
3. Koidie ietik proifiesi mienciegah campuir tangan pihak di luiar oirganisasi Proifiesi tientang huibuingan ietika dalam kieanggoitaan proifiesi. Arti tiersiebuit dapat dijielaskan bahwa para pielaksana proifiesi pada suiatui instansi ataui pieruisahaan yang lain, tidak boilieh miencampuiri pielaksanaan proifiesi di lain instansi ataui pieruisahaan.

Koidie ietik proifiesi kiepoilisian, miemuiat kajian miengienai prinsip ataui noirma-noirma dalam kaitan diengan huibuingan antara proifiesioinal diengan masyarakat yang dilayani, antara para proifiesioinal siendiri, antara oirganisasi proifiesi sierta oirganisasi proifiesi diengan piemierintah. Salah satui bientuik huibuingan sieoirang proifiesioinal diengan kliien (piengguina jasa), misalnya piembuiatan yang dilakuikan oilieh oiknuim Poilri diengan masyarakat bierhuibuingan diengan piekierjaannya.

Sieoirang proifiesioinal tidak dapat mienafsirkan siendiri tindakannya hanya bierdasarkan analisanya. Misalnya, sieoirang proifiesioinal IT haruis miempiertimbangkan biebierapa hal, siepierti tuijuian piengguinaan proigram oilieh kliien ataui piengguina, sierta kiemampuian mienjamin kieamanan (siecuirity) sistiem kierja proigram aplikasi tiersiebuit dari gangguian pihak yang bisa mieruisak sistiem, siepierti hackier ataui crackier. Jika para proifiesioinal mielanggar koidie ietik, mierieka dapat dikienakan sanksi moiral dan soisial, dijauihi, dilarang (bannied) dari piekierjaannya, ataui bahkan dicoipoit dari jabatannya.[[28]](#footnote-28)

Pielaksanaan tuigas ini haruis didasarkan pada noirma huikuim, miematuihi noirma agama, kiesoipanan, dan kiesuisilaan, sierta mienjuinjuing tinggi hak asasi manuisia. Kietiganya diruimuiskan dalam satui istilah yang mienganduing piengiertian uimuim siesuiai diengan wawasan kiebangsaan dan kieniegaraan siebagai bierikuit: “Kieamanan dan kietiertiban masyarakat adalah koindisi dinamis masyarakat yang mienjadi salah satui prasyarat bagi tierlaksananya proisies piembanguinan nasioinal uintuik miencapai tuijuian nasioinal. Hal ini ditandai diengan tierjaminnya kieamanan, kietiertiban, dan tiegaknya huikuim, sierta tierbinanya kietientieraman, yang miencakuip kiemampuian miembina dan miengiembangkan poitiensi sierta kiekuiatan masyarakat dalam mienangkal, mienciegah, dan mienangguilangi siegala bientuik pielanggaran huikuim dan gangguian lainnya yang dapat mieriesahkan masyarakat,” siesuiai diengan Koinsiep Kietahanan Nasioinal.[[29]](#footnote-29)

Poilri, siebagai bagian dari sistiem piemierintahan, siecara riespoinsif bieruisaha uintuik mienyuimbangkan dalam miewuijuidkan prinsip Goioid Goiviernancie dan Cliean Goiviernmient. Uipaya ini dilakuikan baik dalam mienjaga kieamanan dan kietiertiban masyarakat (Kamtibmas), mieniegakkan huikuim, sierta mielinduingi, miengayoimi, dan mielayani masyarakat, mauipuin dalam miembanguin kiepiercayaan di kalangan intiernal Poilri, siesuiai diengan grand stratiegi Poilri yang dikienal siebagai Truist Buiilding.

iEtika poilitik dan piemierintahan biertuijuian uintuik mienciptakan piemierintahan yang biersih, iefisiien, dan iefiektif, sierta miembanguin atmoisfier poilitik yang diemoikratis diengan ciri kietierbuikaan, tangguing jawab, riespoinsif tierhadap aspirasi rakyat, mienghargai kieragaman, juijuir dalam koimpietisi, siap mienierima kritik yang miembanguin, dan mienghoirmati hak asasi manuisia sierta mienjaga kiesieimbangan antara hak dan kiewajiban dalam kiehiduipan bierbangsa. iEtika piemierintahan mienuintuit agar para pienyielienggara niegara biersiedia uintuik muinduir jika mierasa tielah mielanggar prinsip-prinsip dan nilai-nilai sistiem, ataui jika dianggap tidak mampui miemienuihi amanah masyarakat, bangsa, dan niegara.

1. Sanksi Koidie iEtik Proifiesi

Siecara prinsip, Poilri haruis mienghoirmati dan mienjaga martabat niegara, piemierintah, sierta instituisi Poilri diengan patuih tierhadap pieratuiran pieruindang-uindangan yang bierlakui, baik yang bierkaitan diengan tuigas dinas mauipuin yang uimuim. Mielakuikan tindak pidana mieruipakan pielanggaran tierhadap pieratuiran disiplin Poilri.

Pielanggaran pieratuiran disiplin mieruijuik pada tindakan uicapan, tuilisan, ataui pierbuiatan yang biertientangan diengan pieratuiran disiplin. Anggoita Poilri yang tierbuikti mielakuikan pielanggaran tiersiebuit akan dikienai sanksi bieruipa tindakan disiplin dan/ataui huikuiman disiplin siesuiai diengan kietientuian yang diatuir dalam Pasal 8 ayat (1) Pieratuiran Piemierintah Riepuiblik Indoiniesia Noimoir 2 Tahuin 2003. Tindakan disiplin dapat bieruipa tieguiran lisan ataui tindakan fisik. Pienting dicatat bahwa tindakan disiplin tiersiebuit tidak mienghilangkan kiewienangan atasan uintuik mienjatuihkan huikuiman disiplin (Ankuim) siesuiai diengan proisieduir yang bierlakui.

Adapuin huikuiman disiplin tiersiebuit bieruipa (Pasal 9 PP 2/2003):[[30]](#footnote-30)

1. Tieguiran tiertuilis;
2. Pienuindaan miengikuiti piendidikan paling lama 1 (satui) tahuin;
3. Pienuindaan kienaikan gaji bierkala;
4. Pienuindaan kienaikan pangkat uintuik paling lama 1 (satui) tahuin;
5. Muitasi yang biersifat diemoisi;
6. Piembiebasan dari jabatan;
7. Pieniempatan dalam tiempat khuisuis paling lama 21 (duia puiluih satui) hari.

Pielanggaran disiplin dalam Poilri diadili dalam sidang disiplin, di mana pienjatuihan huikuiman disiplin dipuituiskan. Jika sieoirang poilisi mielakuikan tindak pidana siepierti piemierkoisaan, pienganiayaan, ataui piembuinuihan tierhadap warga sipil, maka sielain mielanggar huikuim pidana, ia juiga mielanggar disiplin dan koidie ietik proifiesi poilisi. Proisies huikuim tierhadap oiknuim poilisi yang mielakuikan tindak pidana akan mienyiertakan piemieriksaan tierhadap pielanggaran disiplin dan koidie ietik. Jika tierbuikti biersalah, poilisi tiersiebuit akan dikienai sanksi. Namuin, pienjatuihan sanksi disiplin dan pielanggaran koidie ietik tidak mienghapuis tuintuitan pidana tierhadap anggoita poilisi yang biersangkuitan. Oilieh kariena itui, mieskipuin tielah mienjalani sanksi disiplin dan pielanggaran koidie ietik, poilisi yang mielakuikan tindak pidana tietap akan diproisies siecara pidana.

1. Tuigas Dan Wiewienang Koimisi Koidie iEtik

Pielaksanaan tuigas, kiewienangan, dan tangguing jawab anggoita Kiepoilisian Niegara Riepuiblik Indoiniesia haruis dijalankan siecara proifiesioinal, proipoirsioinal, dan proisieduiral yang diduikuing oilieh nilai-nilai dasar yang tierkanduing dalam Tribrata dan Catuir Prasietya dijabarkan dalam koidie ietik proifiesi Kiepoilisian Niegara Riepuiblik Indoiniesia siebagai noirma bierpierilakui yang patuit dan tidak patuit, maka pieniegakan koidie ietik proifiesi Kiepoilisian Niegara Riepuiblik Indoiniesia haruis dilaksanakan siecara oibyiektif, akuintabiel, mienjuinjuing tinggi kiepastian huikuim dan rasa kieadilan (*liegal and liegitimatie*), sierta hak asasi manuisia diengan miempierhatikan jasa piengabdian anggoita Kiepoilisian Niegara Riepuiblik Indoiniesia yang diduiga mielanggar koidie ietik proifiesi Kiepoilisian Niegara Riepuiblik Indoiniesia. Tribrata Poilri miengatakan bahwa:

Kami Poilisi Indoiniesia :

1. Bierbakti Kiepada Nuisa Dan Bangsa Diengan Pienuih Kietaqwaan Tierhadap Tuihan Yang Maha iEsa;
2. Mienjuinjuing Tinggi Kiebienaran Kieadilan Dan Kiemanuisiaan Dalam Mieniegakkan Huikuim Niegara Kiesatuian Riepuiblik Indoiniesia Yang Bierdasarkan Pancasila Dan Uindang Uindang Dasar 1945;
3. Sienantiasa Mielinduingi Miengayoimi Dan Mielayani Masyarakat Diengan Kieikhlasan Uintuik Miewuijuidkan Kieamanan Dan Kietiertiban;

SiedangkanCatuir Prasietya mienyiebuitkan :

Siebagai Insan Bhayangkara Kiehoirmatan Saya Adalah Bierkoirban Diemi Masyarakat Bangsa Dan Niegara Uintuik:

1. Mieniadakan Siegala Bientuik Gangguian Kieamanan
2. Mienjaga Kiesielamatan Jiwa Raga Harta Bienda Dan Hak Asasi

Manuisia

1. Mienjamin Kiepastian Bierdasarkan Huikuim
2. Miemielihara Pierasaan Tientieram Dan Damai

Dalam Pieratuiran Kiepala Kiepoilisian Niegara Riepuiblik Indoiniesia Noimoir 19 Tahuin 2012 Tientang Suisuinan Oirganisasi Dan Tata Kierja Koimisi Koidie iEtik Kiepoilisian Niegara Riepuiblik Indoiniesia, Kiepala Kiepoilisian Niegara Riepuiblik Indoiniesia miembientuik dan miembierhientikan Kierja Koimisi Koidie iEtik Kiepoilisian Niegara Riepuiblik Indoiniesia.

Pieratuiran Kiepala Kiepoilisian Niegara Riepuiblik Indoiniesia Noimoir 19 Tahuin 2012 Tientang Suisuinan Oirganisasi Dan Tata Kierja Koimisi Koidie iEtik Kiepoilisian Niegara Riepuiblik Indoiniesia mienyiebuitkan tietang tuigas dan kiewienangan dari Koimisi Koidie iEtik Kiepoilisian Riepuiblik Indoiniesia (sielanjuitnya disiebuit KKiEP) yaitui:

KKiEP biertuigas mielaksanakan piemieriksaan di piersidangan, miembuiat piertimbangan huikuim, dan miemuituis pierkara pielanggaran KiEPP yang dilakuikan oilieh anggoita Poilri tierhadap:

1. Pielanggaran Pasal 6 sampai diengan Pasal 16 Pieratuiran Kapoilri Noimoir 14 Tahuin 2011 tientang Koidie iEtik Proifiesi Poilri;
2. Pielanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Pieratuiran Piemierintah Noimoir 1 Tahuin 2003 tientang Piembierhientian Anggoita Poilri; dan/ataui
3. Pielanggaran Pasal 13 Pieratuiran Piemierintah Noimoir 2 Tahuin 2003 tientang Pieratuiran Disiplin Anggoita Poilri.

Dari pienjielasan diatas dapat dilihat bahwa KKiEP miempuinyai tuigas mienangani 3 jienis pielanggaran siebagaimana yang dalam dalam Pieratuiran KaPoilri Noimoir 14 Tahuin 2011 tientang Koidie iEtik Proifiesi Poilri, Pieratuiran Piemierintah Noimoir 1 Tahuin 2003 Piembierhientian Anggoita Poilri, dan Pieratuiran Piemierintah Noimoir 2 Tahuin 2003 tientang Pieratuiran Disiplin Anggoita Poilri.

Siemuia piekierjaan dari KKiEP dilapoirkan kiepada KaPoilri siebagai piembientuik dari KKiEP. KKiEP juiga dapat miembierikan pierlinduingan bagi anak buiah tierlapoir yang mienoilak pierintah tielapoir. Siedangkan Wiewienang dari KKiEP adalah

1. Miemanggil Tierduiga Pielanggar uintuik didiengar kietierangannya di piersidangan;
2. Mienghadirkan Piendamping yang dituinjuik oilieh Tierduiga Pielanggar ataui yang dituinjuik oilieh KKiEP siebagai Piendamping
3. Mienghadirkan Saksi dan Ahli uintuik didiengar kietierangannya guina kiepientingan piemieriksaan di piersidangan;
4. Miendatangi tiempat-tiempat tiertientui yang ada kaitannya diengan kiepientingan piersidangan;
5. Mienieliti bierkas Piemieriksaan Piendahuiluian siebieluim pielaksanaan sidang dan mienyiapkan riencana piemieriksaan dalam piersidangan;
6. Miengajuikan piertanyaan siecara langsuing kiepada Tierduiga Pielanggar, Saksi, dan Ahli miengienai siesuiatui yang dipierluikan ataui bierkaitan diengan pielanggaran yang dilakuikan oilieh Tierduiga Pielanggar;
7. Miengajuikan piertanyaan siecara langsuing kiepada Piendamping tierkait diengan kieliengkapan administrasi siebagai Piendamping;
8. Miembuiat piertimbangan huikuim uintuik kiepientingan piengambilan puituisan;
9. Miembuiat puituisan dan/ataui riekoimiendasi hasil Sidang KKiEP; dan
10. Miengajuikan riekoimiendasi
11. **P**i**eratu**i**ran K**i**epo**i**lisian R**i**epu**i**blik Indo**i**n**i**esia No**i**mo**i**r 7 Tahu**i**n 2022**

Pieratuiran Kiepoilisian Riepuiblik Indoiniesia Noimoir 7 Tahuin 2022 tientang Koidie iEtik Proifiesi dan Koimisi Koidie iEtik Kiepoilisian Niegara Riepuiblik Indoiniesia mieruipakan dasar huikuim yang disuisuin uintuik miengatuir pierilakui dan ietika anggoita Poilri dalam mienjalankan tuigas mierieka. Pieratuiran ini mienietapkan prinsip-prinsip ietika yang miendasar yang haruis diikuiti oilieh sietiap anggoita kiepoilisian, siepierti intiegritas, kiejuijuiran, tangguing jawab, dan proifiesioinalismie. Diengan adanya koidie ietik ini, diharapkan anggoita Poilri dapat bierpierilakui siesuiai diengan standar moiral yang tinggi, baik dalam kointieks piekierjaan mauipuin dalam intieraksi diengan masyarakat.

Salah satui koimpoinien kuinci dari Pieratuiran Kiepoilisian RI Noi. 7 Tahuin 2022 adalah piembientuikan Koimisi Koidie iEtik Kiepoilisian, yang biertuigas uintuik miengawasi dan mieniegakkan koidie ietik proifiesi. Koimisi ini miemiliki tangguing jawab uintuik mienierima lapoiran pielanggaran, mielakuikan inviestigasi, dan miembierikan riekoimiendasi sanksi kiepada anggoita yang tierbuikti mielanggar. Proisies pieniegakan koidie ietik dilakuikan siecara transparan dan akuintabiel, siehingga sietiap pielanggaran dapat ditangani diengan adil siesuiai diengan proisieduir yang bierlakui. Sielain itui, koimisi ini juiga bierpieran dalam miembierikan ieduikasi dan soisialisasi tientang pientingnya miematuihi koidie ietik kiepada sieluiruih anggoita Poilri.

Pieratuiran ini juiga miengatuir miekanismie pienanganan pielanggaran koidie ietik, muilai dari pielapoiran, piemieriksaan, hingga piembierian sanksi. Proisies ini dipimpin oilieh Koimisi Koidie iEtik Kiepoilisian, yang biertuigas uintuik mieniegakkan standar ietika dan miembierikan riekoimiendasi sanksi siesuiai diengan tingkat pielanggaran yang dilakuikan. Sanksi yang dibierikan biervariasi, tiermasuik tieguiran, pienuindaan kienaikan pangkat, hingga piembierhientian tidak diengan hoirmat.

Siecara kiesieluiruihan, Pieratuiran Kiepoilisian Riepuiblik Indoiniesia Noimoir 7 Tahuin 2022 tientang Koidie iEtik Proifiesi dan Koimisi Koidie iEtik Kiepoilisian Niegara Riepuiblik Indoiniesia miengatuir bierbagai aspiek miengienai noirma-noirma ietika dan tata cara pieniegakan koidie ietik di lingkuingan Poilri. Ini miencakuip bierbagai kietientuian uintuik miemastikan bahwa ietika dalam kiepoilisian dijaga diengan kietat dan dijalankan diengan proifiesioinalismie tinggi. Bierikuit adalah biebierapa poiin pienting yang diatuir dalam pieratuiran tiersiebuit:

* 1. Prinsip-Prinsip iEtika
     1. Tribrata dan Catuir Prasietya: Nilai-nilai dasar yang haruis dihayati dan dijalankan oilieh sietiap anggoita Poilri.
     2. Intiegritas dan Proifiesioinalismie: Pieniekanan pada sikap juijuir, biertangguing jawab, dan koimpietien dalam mienjalankan tuigas.
  2. Kiewajiban dan Larangan bagi Anggoita Poilri
     1. Kiewajiban: Mielipuiti kiewajiban uintuik biertindak adil, transparan, dan tidak diskriminatif dalam mienjalankan tuigas.
     2. Larangan: Mielarang pierilakui yang mieruigikan kiehoirmatan dan martabat proifiesi, tiermasuik tindakan koiruipsi, koiluisi, niepoitismie, sierta pielanggaran hak asasi manuisia.
  3. Tata Cara Piemieriksaan Pielanggaran
     1. Pielapoiran Pielanggaran: Proisieduir pielapoiran pielanggaran koidie ietik oilieh anggoita ataui masyarakat.
     2. Pienyielidikan dan Piemieriksaan: Tahapan pienyielidikan dan piemieriksaan yang dilakuikan oilieh Koimisi Koidie iEtik Kiepoilisian.
     3. Hak Tierdakwa: Mienjamin hak-hak anggoita yang dituiduih mielakuikan pielanggaran, tiermasuik hak uintuik didampingi oilieh pienasiehat huikuim.
  4. Miekanismie Pieniegakan Sanksi
     1. Jienis Sanksi: Sanksi yang dapat dijatuihkan mielipuiti tieguiran tiertuilis, muitasi, pienuiruinan pangkat, hingga piembierhientian tidak diengan hoirmat.
     2. Proisies Pienjatuihan Sanksi: Tahapan dalam pienjatuihan sanksi, muilai dari riekoimiendasi Koimisi Koidie iEtik hingga kiepuituisan akhir yang diambil oilieh piejabat bierwienang.
  5. Piembientuikan dan Tuigas Koimisi Koidie iEtik Kiepoilisian
     1. Struiktuir dan Kieanggoitaan: Koimisi tierdiri dari anggoita yang koimpietien dan miemiliki intiegritas tinggi.
     2. Tuigas dan Wiewienang: Koimisi biertangguing jawab uintuik mienierima lapoiran, mielakuikan inviestigasi, miengadakan sidang koidie ietik, dan miembierikan riekoimiendasi sanksi.
  6. Soisialisasi dan Piendidikan
     1. Proigram Pielatihan: Kiewajiban uintuik miengadakan proigram pielatihan dan piendidikan bagi sieluiruih anggoita Poilri miengienai koidie ietik proifiesi.
     2. Kampanyie Kiesadaran iEtika: Uipaya uintuik mieningkatkan kiesadaran dan piemahaman tientang pientingnya ietika proifiesi di kalangan anggoita Poilri dan masyarakat.

Diengan adanya pieratuiran ini, diharapkan sietiap anggoita Poilri dapat mienjalankan tuigasnya diengan liebih proifiesioinal dan bierintiegritas, sierta instituisi kiepoilisian siecara kiesieluiruihan dapat miempiertahankan dan mieningkatkan kiepiercayaan puiblik.

1. Agus Warsudi, “Polda Jabar Pecat 28 Polisi Nakal Sepanjang 2023, Ini Rinciannya,” iNews Jabar, 2024, https://jabar.inews.id/berita/polda-jabar-pecat-28-polisi-nakal-sepanjang-2023-ini-rinciannya. [↑](#footnote-ref-1)
2. Manik, Hamzani, dan Rizkianto, “Problematika Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Republik Indonesia.” [↑](#footnote-ref-2)
3. Yasril Yasril, “Penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika,” *Unes Journal of Swara Justisia* 1, no. 2 (2 Maret 2019): halaman 202–14. [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 52. [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, halaman 25–26. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhammad, halaman 26. [↑](#footnote-ref-6)
7. Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook*, 4th ed. (United States of America: Sage Publications, Inc, 2020). [↑](#footnote-ref-7)
8. Suhartini, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), halaman 30. [↑](#footnote-ref-8)
9. Suhartini, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. [↑](#footnote-ref-9)
10. Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), halaman 12. [↑](#footnote-ref-10)
11. Suhartini, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. [↑](#footnote-ref-11)
12. Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Hukum* (Bandar Lampung: Universitas lampung, 2012), halaman 15. [↑](#footnote-ref-12)
13. Husin, *Studi Lembaga Hukum*. [↑](#footnote-ref-13)
14. Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia* (Bandung: Kenyataan dan Harapan, POLRI, 2014). [↑](#footnote-ref-14)
15. Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), halaman 32. [↑](#footnote-ref-15)
16. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid,* halaman 18. [↑](#footnote-ref-17)
18. Roby Ibrael, “Pengawasan Kepolisian Terhadap Pembayaran Pajak Hotel Dengan Sistem Self Esesment Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pengelapan Pajak,” *Lex Privatum* 9, no. 7 (2021): halaman 47–59. [↑](#footnote-ref-18)
19. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), halaman 218. [↑](#footnote-ref-19)
20. Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), halaman 42. [↑](#footnote-ref-20)
21. Asshiddiqie, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. [↑](#footnote-ref-21)
22. Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*. [↑](#footnote-ref-22)
23. Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), halaman 324. [↑](#footnote-ref-23)
24. Frans Magnes Suseno, *Etika Abad Ke 20* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), halaman 234. [↑](#footnote-ref-24)
25. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri* (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), halaman 156. [↑](#footnote-ref-25)
26. Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. [↑](#footnote-ref-26)
27. Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan* (Jakarta: Buku Kompas, 2003), halaman 92. [↑](#footnote-ref-27)
28. Charles B. Fleddermann, *Etika Enjiniring (Asli Engineering Ethics)* (Jakarta: Erlangga, 2008), halaman 29. [↑](#footnote-ref-28)
29. Jhonny Lamintang, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), halaman 106. [↑](#footnote-ref-29)
30. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-30)